

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. *Civic Education*

a. Definisi *Civic Education*

Menurut Sri Wuryan dalam buku Ilmu Kewarganegaraan (2014, hlm 1) mengemukakan asal usul kata “*Civics*” dimana secara etimologis berasal dari kata “*Civicus*” yang merujuk pada warga negara atau penduduk sebuah kota (polis). Istilah ini berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi langsung dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno di Athena.

Civics menurut Edmonson dikutip dari Ubaedillah (2015, hlm 13) menyatakan bahwa makna “*civics*” didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, dan hak warga negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa *civics* merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana dijelaskan dalam *Dictionary of education*.

Levine dalam Ryan (2018) mengemukakan bahwa “*Civic Education is a discipline without a field with contribution coming from political, science, psychology, sociology, educational policy, and social studies education*”. Dengan kata lain bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah disiplin ilmu dengan kontribusi yang berasal dari ilmu politik, psikologi, sosiologi, kebijakan pendidikan dan pendidikan ilmu sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bersifat interdisipliner, teori dan penelitian dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki perspektif yang saling melengkapi dan kontradiktif yang digunakan untuk memperkuat pemikiran dan praktek di lapangan.

Menurut John J. Cogan dikutip dari Ratnaningsih (2018) mengartikan *Civic Education* sebagai “*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their*

communities in their adult lives”. *Civic Education* merupakan mapel dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Lebih lanjut dalam ensiklopedia “Populer Politik Pembangunan Pancasila”, disampaikan bahwa “Ilmu Kewarganegaraan Negara” mengacu pada kajian mengenai warga negara dalam suatu negara tertentu, yang dilihat dari perspektif hukum tata negara. Menurut Zamroni (2018, hlm 15) mengemukakan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memiliki fokus demokrasi, bertujuan untuk mempersiapkan anggota masyarakat agar memiliki kemampuan berfikir kritis dan bertindak secara demokratis. Melalui aktivitas ini, kesadaran tentang fakta bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang memberikan jaminan atas hak-hak individu ditanamkan kepada generasi baru. Penting untuk diingat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang dapat dicontoh begitu saja dari masyarakat lain, melainkan merupakan suatu proses pembelajaran.

Menurut Sriwuryan (2014, hlm 77) yaitu sama halnya dengan pelajaran ilmu kewarganegaraan maupun pendidikan kewarganegaraan, tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang berkualitas, yaitu individu yang memiliki sifat baik, kreativitas, tanggung jawab, kecerdasan, kritis, dan partisipatif. Menurut Laros Tuhuteru (2022, hlm 7) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan yang bijak dari berbagai opsi yang ada, dengan memberi pengalaman dan pemahaman yang membantu mengembangkan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memperkuat masyarakat bebas.

Menurut Sriwuryan (2014, hlm 9) Pendidikan Pancasila menekankan pada aspek moral, diharapkan dapat terrefleksi dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam kerangka masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok agama. Tujuan lainnya adalah menumbuhkan perilaku yang manusiawi yang adil dan

beradab, mendukung persatuan dalam masyarakat yang memiliki beragam budaya dan kepentingan, serta mendorong sikap yang mendukung demokrasi dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok.

Ciri khas dari PPKn adalah menciptakan individu yang berakhlak Pancasila, beriman dan bertakwa, memahami hak dan kewajiban serta menjalankannya dengan kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Exposito (2019, hlm 402) menunjukkan bahwa karakteristik identitas kemanusiaan Indonesia telah lama diakui baik sebagai individu maupun kolektivitas yang menghargai perbedaan dan memiliki nilai-nilai luhur, bermoral, dan religius.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila bertujuan agar nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tetap lestari dan dapat tetap relevan lintas generasi sehingga seluruh komponen masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut, terkhusus lagi para pendidik yang memiliki tanggung jawab membimbing peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam karakter peserta didik.

b. Urgensi *Civic Education*

Urgensi dari *civic education* atau pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari relevansi dan tujuan penerapannya. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu (a) mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran diri atas konektivitas dan tanggung jawab agar menjadi warga negara yang aktif dan berhati nurani global, (b) membentuk warga negara yang sadar akan pemahaman kritis tentang globalisasi, terlibat di dalam masalah lokal maupun global, dan sadar akan peran untuk masa depan dengan terlibat dalam tindakan konstruktif mempromosikan perubahan-perubahan sosial baik tingkat lokal, nasional, regional, dan global (Franch, 2019).

Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang baik dengan dibekali keterampilan dalam komunitas dunia yang terglobalisasi, Kiwan (2019). Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diterapkan di abad 21, penting nya pendidikan kewarganegaraan karena menempatkan keprihatinan pada keadilan sosial, toleransi, keberagaman, dan martabat manusia, Davids (2016).

Menurut Nasution, A.R (2016) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter Bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (*global society*) di era modern saat ini..

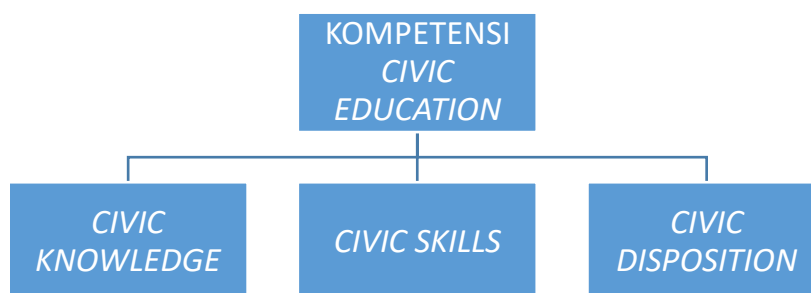
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan global. Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan global yang dimuat dalam publikasi kurikulum internasional UNESCO yaitu memberdayakan peserta didik untuk ikut andil dan berperan aktif menciptakan perdamaian, keamanan, keadilan, toleran, inklusif, dan berkelanjutan baik pada tingkat lokal maupun global, Pashby (2018). Pendidikan kewarganegaraan global menekankan pada perasaan kemanusiaan yang sama dan komunitas, serta saling ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial budaya, Cotton (2019).

Pendidikan kewarganegaraan memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, membayangkan, memahami, dan bertindak sebagai warga negara dunia baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, Soong (2018). Pendidikan kewarganegaraan menjadi konsep dalam wacana kebijakan pendidikan abad 21 untuk membentuk peserta didik yang memahami dunia kontemporer dan berperan di dalamnya. pengembangan kajian kewarganegaraan patut dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Lalu Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsesus dasar nasional Indonesia : Pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan yang humanis partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai ke Indonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

c. Pembagian Civic Education

Merujuk pada buku Margaret Branson (1998) dimana komponen-komponen utama pembentuk dari *civic education* yang cocok untuk masyarakat demokratis sesuai dengan hasil review dari 3000 lebih individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam pembentukan *the national standards for civics and government* dimana menghasilkan tiga komponen utama *civic education*, yaitu : *Civic Knowledge*, *Civic Skills*, dan *Civic Disposition*.



Gambar 2.1 Komponen Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

a) Civic Knowledge

Civic Knowledge atau yang disebut pengetahuan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan kandungan atau hal apa saja yang seharusnya diketahui oleh seorang warga negara. Dalam *civic knowledge* juga berisikan hal-hal yang harus diketahui serta dipahami secara layak oleh warga negara. Seperti yang disebutkan oleh Winarno (2019, hlm 108) bahwa “*Civic related knowledge, both historical and contemporary, such as understanding the structure and mechanics of constitutional government, and knowing who the local political actors are and how democratic institutions function*”. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa pengetahuan terkait kewarganegaraan ini, baik secara historis ataupun kontemporer, seperti memahami struktur serta mekanisme pemerintahan konstitusional, dan mengetahui siapa aktor politik dan bagaimana lembaga demokrasi tersebut berfungsi.

Menurut Raharja (2017, hlm 203-204) pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) adalah hal pengetahuan yang perlu dimiliki oleh warga negara meliputi hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Pemahaman mendasar ini meluas hingga ke konfigurasi sistem politik dan pemerintahan, pengaturan sosial yang diinginkan, prinsip-prinsip universal dalam masyarakat demokratis, dan metode kolaboratif untuk menerapkannya guna kemajuan kolektif dan kehidupan berdampingan yang harmonis dalam masyarakat global.

Menurut Denny Setiawan (2015, hlm 64) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) mengacu pada topik-topik yang perlu diketahui oleh aspek pengetahuan tercermin melalui pemahaman tentang kerangka dasar sistem sosial, politik, negara, dan pemerintahan. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menyelami aspek manajemen dan masyarakat sipil. Materi ini membantu siswa dalam melakukan refleksi luas dan analisis logis tentang hakikat eksistensi sosial, dinamika politik, dan keperluan tata pemerintahan. Ini mengeksplorasi alasan di balik kebutuhan akan politik dan pemerintahan, tujuan pemerintahan, sifat-sifat penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas) serta sifat dari maksud dan tujuan konstitusi ; dan bentuk-bentuk alternatif organisasi pemerintahan.

Melalui berpikir kritis seseorang dapat menemukan kebenaran secara objektif, berani mengkritisi berbagai penyimpangan sosial, mampu menggali kelemahan-kelemahan lain sebagai bahan informasi bagi tindakan dan perilaku yang rasional. Berpikir kritis merupakan reaksi terhadap pemikiran tradisional, yang cenderung menyembunyikan realitas hanya untuk mendukung status quo dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Memang pembelajaran sebagai wahana berpikir kritis sudah menjadi tradisi dalam ilmu sosial dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai intinya, yaitu tradisi “inkuiri reflektif”. Melalui tradisi ini, pembelajaran yang sebenarnya berpusat pada siswa, karena siswa belajar melakukan aktivitasnya sendiri: menganalisis, mempelajari, kemudian berargumentasi, berdiskusi dan membuat evaluasi akademik materi ilmu sosial, peran guru adalah memfasilitasi pembelajaran. Prosedur. Dengan demikian, community college yang ideal menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa.

Menurut Winarno (2019, hlm. 108) mengatakan bahwa *National Center for Learning and Citizenship* (NCLC) menyatakan “*civic knowledge* ini berisikan elemen pernyataan yang memiliki kaitan dengan sejarah serta pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman

terkait struktur serta mekanisme pemerintahan konstitusional serta prinsip yang melandasinya”. Menurut Winarno (2019, hlm. 108) terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan civic knowledge yang meliputi :

a. *Democracy and Government Structure* (Demokrasi dan Struktur Pemerintahan)

- 1) *What are civic life, politics and government* (Apa itu kehidupan sipil, politik, dan pemerintahan)?
- 2) *What are the foundations of the American political system* (Apa dasar dari sistem politik Amerika)?
- 3) *How does the government and principles of American democracy* (Bagaimana pemerintahan dan Prinsip-prinsip demokrasi Amerika)?
- 4) *What is the relationship of the United States to other nations and to world affairs* (Apa hubungan Amerika Serikat dengan negara lain dan dengan urusan dunia)?

b. *Citizenship* (Kewarganegaraan) *What are the roles of citizens in formal institutions of American democracy* (Apa peran warga negara dalam lembaga formal demokrasi di Amerika)?

c. *Civil Society* (Masyarakat Sipil) *What are the roles of individuals in civil society as a part of American democracy* (Apa peran individu dalam masyarakat sipil sebagai bagian dari demokrasi Amerika)?

Sedangkan oleh Margaret Stimman Branson dalam Winarno (2019, hlm. 108) “komponen terkait pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam lima bentuk pertanyaan yang terus-menerus diajukan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang bisa berpikir kritis”. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat pada mata pelajaran Civics and Government sudah mengajarkan kelima pertanyaan tersebut yang terdiri dari :

- 1) *What are civic life, politics, and government* (Apa itu kehidupan sipil, politik, dan pemerintahan)?

- 2) *What are the foundations of the American political system* (Apa fondasifondasi sistem politik Amerika)?
- 3) *How does the government established by the Constitution embody the purposes, values, and principles of American democracy* (Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika)?
- 4) *What is the relationship of the United States to other nations and to world affairs* (Bagaimana hubungan negara Amerika Serikat dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah internasional)?
- 5) *What are the roles of citizens in American democracy* (Apa peran warga negara dalam demokrasi Amerika)?

Menurut Winarno (2019, hlm. 109) mengatakan bahwa komponen terkait civic knowledge juga dikembangkan oleh beberapa lembaga studi. Salah satunya dikembangkan oleh Center for Indonesian Civic Education (CICED) yang terdiri dari :

- 1) *Principles of democracy* (Prinsip demokrasi).
- 2) *Comprehend of state constitution* (Memahami konstitusi negara).
- 3) *Citizen's rights and responsibility* (Hak dan tanggung jawab warga negara).
- 4) *State's rule of law* (Negara merupakan supremasi hukum).
- 5) *Good government* (Pemerintahan yang baik).
- 6) *Citizenship* (Kewarganegaraan).
- 7) *People sovereignty* (Kedaulatan rakyat)
- 8) *Free and fair tribune* (Bebas dan adil).
- 9) *Equality and equity* (Kesetaraan dan pemerataan)
- 10) *Justice* (Keadilan).
- 11) *Human rights* (Hak Asasi Manusia).
- 12) *Civilization* (Kebudayaan)
- 13) *Cultural differences* (Perbedaan budaya)
- 14) *Democratic processes* (Proses demokrasi).

- 15) *Citizenship activities* (Kegiatan kewarganegaraan).
- 16) *National identity/attributes* (Identitas Nasional).
- 17) *Civil society* (Masyarakat Sipil).
- 18) *Free market economy* (Ekonomi pasar bebas).
- 19) *Political processes* (Proses Politik)
- 20) *Separation/Distribution of power* (Distribusi Kekuasaan).

Dari hasil paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) adalah Informasi yang seharusnya dimiliki oleh warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai anggota suatu negara adalah sangat penting dalam membentuk kerangka sistem politik dan pemerintahan, serta mendirikan harmoni sosial yang ideal dalam konteks sosial dan nasional. Selain itu, pengetahuan ini mencakup prinsip-prinsip universal dalam masyarakat demokratis, seiring dengan strategi-strategi untuk upaya kolaboratif dalam mencapai kemajuan kolektif serta membina kehidupan bersama yang harmonis dalam skala global.

b) *Civic Skills*

Menurut Burhan (2016, hlm. 8), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) adalah keterampilan kewarganegaraan, partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Sunarso (2009, hlm. 71), Kapabilitas kewarganegaraan berkembang dari pengetahuan kewarganegaraan, menghasilkan pemerolehan pengetahuan. sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna, sedangkan keterampilan kewarganegaraan mencakup keterampilan intelektual (*intellectual skill*) dan keterampilan partisipatif (*participation skill*). Menurut Raharja (2017, hlm. 204) *Civic Skill* adalah pengembangan pengetahuan warga negara sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang berguna karena dapat berguna untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Branson dalam buku Winarno (2014, hlm. 170), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) adalah keterampilan yang berkembang dari Pengetahuan Kewarganegaraan, sehingga pengetahuan merupakan ulat dan mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar yang tampak pada kelima soal tersebut. seperti dijelaskan di atas, tetapi harus memiliki keterampilan intelektual dan partisipatif yang relevan.” Keterampilan intelektual yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang terinformasi, efektif, dan bertanggung jawab disebut berpikir kritis. Standar Nasional untuk Kewarganegaraan dan Administrasi dan Penilaian Kemajuan Pendidikan Nasional (NAEP) tahun 1998 memberikan klasifikasi, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan keterampilan (*identifying and describing*), kemudian menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi (*explaining, analysing, and evaluating*) dan mengambil serta mempertahankan posisi dalam urusan publik (*defending positions on public issue*).

Pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi atau memberi makna pada sesuatu yang nyata, seperti bendera, simbol nasional, lagu kebangsaan, monumen nasional, atau peristiwa politik dan administratif seperti Hari Kemerdekaan. Pendidikan kewarganegaraan juga memberikan kesempatan untuk memahami atau memberi makna pada sesuatu yang tidak berwujud, seperti citacita nasional, aspirasi dan tujuan bernegara, hak mayoritas dan minoritas, masyarakat sipil dan konstitusionalisme. Mengenali tanda-tanda bahasa dan emosi juga sangat penting bagi seorang warga negara. Anda harus memahami dengan jelas arti sebenarnya dari bahasa dan simbol emosional yang digunakan.

Keterampilan intelektual lain yang dipromosikan oleh pendidikan kewarganegaraan berkualitas tinggi adalah keterampilan deskriptif. Kemampuan untuk menggambarkan fungsi dan proses seperti *checks and balances* atau pengawasan hukum menunjukkan pemahaman. Tren yang jelas dan membatasi, seperti partisipasi dalam kehidupan sipil,

imigrasi atau kehidupan kerja, selalu membantu warga beradaptasi dengan peristiwa jangka panjang.

Menurut Winarno (2015, hlm. 175) Jika dibandingkan dengan dimensi keterampilan kewarganegaraan dengan taksonomi pembelajaran Benjamin S Bloom, maka cocok dengan aspek psikomotoriknya. Meski sejajar, namun tetap harus dipisahkan. Dalam Taksonomi Bloom, ranah psikomotor mewakili hasil belajar yang dicapai melalui keterampilan memanipulasi otot dan kekuatan fisik. Meskipun civic skill bukanlah keterampilan kekuatan fisik, melainkan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Cogan dalam Hakim (et al 2016, hlm. 10) berpendapat bahwa untuk menggambarkan warga negara yang baik harus memiliki Kemampuan untuk (1) mengatasi kompleksitas global; (2) bekerja sama dengan sesama individu; (3) merangkul dan mengakomodasi keragaman budaya; (4) terlibat dalam pemikiran analitis dan sistematis; (5) meredakan konflik tanpa menggunakan kekerasan; (6) mengubah perilaku konsumen untuk melindungi lingkungan; (7) menunjukkan kesadaran akan hak asasi manusia; (8) berpartisipasi dalam tata kelola regional, nasional, dan global. Beberapa pernyataan yang disebutkan terutama berkaitan dengan keterampilan kewarganegaraan, termasuk keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Keterampilan intelektual merupakan keterampilan berpikir kritis yang mencakup kemampuan mengenali, menggambarkan/memperinci, mengkaji, menilai, memastikan, dan membela posisi terhadap isu-isu publik. Namun, keterampilan partisipasi meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan pemantauan dan mempengaruhi. Dengan keterampilan tersebut, warga negara dapat mendukung warga negara untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai aturan negaranya.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Civic Skills* adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan Kewarganegaraan dengan sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang diperoleh berubah menjadi aset keterampilan bagi warga negara yang berguna untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, dimana kemampuan ini mencakup kecakapan intelektual dan kemampuan partisipatif.

c) ***Civic Disposition***

Menurut Pasandra, dkk (2018) mengatakan “*civic disposition* merupakan disposisi sipil yang mengacu pada sifat-sifat kesadaran dan kepedulian terhadap hak orang lain, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan obyektif, kepercayaan, dan kepekaan untuk hidup bersama”.

Menurut Raharja (2017, hlm. 204) Civic disposition atau watak Kewarganegaraan adalah Kewarganegaraan dikembangkan secara perlahan berdasarkan pengalaman di lingkungan sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Malatuny (2017, hlm. 61) berpendapat bahwa kewarganegaraan Konsep pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan atribut esensial dan dedikasi yang diperlukan untuk mempertahankan dan mendorong prinsip-prinsip kewarganegaraan dan tata pemerintahan. Menurut Malatuny (2017, hlm. 66), Civic Disposition memiliki arti penting dalam membentuk prestasi akademis warga negara. Ia berpendapat bahwa keterampilan kewarganegaraan merupakan komponen integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang tercermin dalam karakter kewarganegaraan dan tanggung jawab yang penting untuk pelaksanaannya. Budaya dan pengembangan disposisi ini dapat dicapai secara optimal melalui pengajaran pendidikan kewarganegaraan di semua tingkat pendidikan.

Menurut Diana Owen (2018) *Civic disposition* adalah rasa peduli akan hak dan kesejahteraan orang lain, berlaku adil kepada siapa saja tanpa terkecuali, peka terhadap lingkungan sekitar, saling menghormati dan menghargai, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Jika dalam suatu negara memiliki warga negara yang berkarakter baik maka masa

depan negara tersebut baik dan maju. Begitu juga sebaliknya jika warga negara memiliki watak yang buruk maka masa depan suatu negara tersebut akan sulit maju.

Menurut Winarno (2015, hlm. 194) sikap kewarganegaraan, sebagai unsur utama ketiga dalam pendidikan kewarganegaraan, meliputi dimensi publik dan pribadi yang penting untuk menjaga serta mengembangkan demokrasi konstitusional. Atribut kewarganegaraan, yang dipandang sebagai keterampilan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan melalui pengaruh pelajaran dan pengalaman di dalam lingkungan rumah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah. Pengalaman-pengalaman semacam ini seharusnya membentuk pemahaman bahwa demokrasi memerlukan pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab kepada semua pihak.

Menurut Budi Mulyono (2017, hlm 220) arah dari disposisi kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan atribut penting baik pada tingkat kewarganegaraan maupun pribadi, termasuk akuntabilitas moral, pengendalian diri, dan menghargai nilai intrinsik setiap individu. Demikian pula, tujuannya adalah untuk mengembangkan kualitas yang terkait dengan dinamika sosial, seperti keterlibatan kewarganegaraan, karakter yang baik, ketaatan pada hukum, pemikiran kritis, dan kesiapan untuk terlibat dalam mendengarkan aktif, negosiasi, dan kompromi. Atribut seperti akuntabilitas moral, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap martabat individu sangat penting, sementara atribut dinamika komunitas memiliki tingkat penting yang lebih rendah. Prioritas seperti kesejahteraan warga, kesopanan, kepatuhan terhadap hukum, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk terlibat dalam komunikasi konstruktif dan pembentukan konsensus adalah komponen vital dari demokrasi yang berkembang.

Menurut Popham (1995) dalam buku Winarno (2015, hlm. 194) Ranah afektif menentukan keberhasilan belajar. Sulit bagi orang diharapkan bahwa meskipun tidak memiliki minat pada mata pelajaran tertentu, peserta didik tetap dapat mencapai hasil belajar yang optimal dalam ranah prestasi akademik semua peminat mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pendidik untuk secara efektif merangsang keterlibatan setiap siswa guna mencapai kompetensi yang ditentukan, hubungan emosional seringkali diperlukan untuk menciptakan rasa memiliki, semangat persatuan, nasionalisme, rasa kebersamaan, dan lain-lain. Menurut Nur Kholis (2020, hlm. 451-470) Sebagai pemimpin tim, Kepala Sekolah harus menginspirasi, memberi motivasi, mengarahkan dan mengarahkan dinamika tim inti agar setiap bagian dalam institusi mempunyai visi dan/atau pandangan yang sama. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, guru harus memperhatikan karakteristik afektif siswa ketika merencanakan program pembelajaran dan kegiatan belajar siswa.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *civic disposition* merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang berkaitan dengan watak atau karakter warga negara, dimana karakter memainkan peranan dalam kemajuan sebuah bangsa. Penting nya karakter bagi seorang warga negara dapat dilihat dari karakter warga negara di negara maju seperti Jepang. Berdasarkan hasil analisis Iriyanto (2019) dimana orang-orang Jepang menikmati keterlibatan proses dalam kehidupannya dan tidak serta merta mengharapkan hasil yang instan. Menjaga kejujuran dalam proses pencarian kebenaran dan pengetahuan serta disiplin dalam bekerjanya.

Watak atau karakter terbagi menjadi dua yaitu : “ karakter privat seperti adanya rasa tanggung jawab, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib”. Dan karakter publik yaitu karakter publik juga tidak kalah penting, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan hukum, berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengarkan,

bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang diperlukan untuk mengsucceskan kehidupan demokrasi.

2. Analisis Civic Disposition

a. Pentingnya Civic Disposition

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali ditegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. Dalam Margaret Branson (1999, hlm 26) mengungkapkan pentingnya watak kewarganegaraan ini dalam kata-katanya : “Kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkannya. Tanpa konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih disana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya”.

Bagi suatu bangsa, karakter adalah nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara sehingga menjadikannya identitas suatu masyarakat. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan adaptif pada semua situasi.

b. Ciri-ciri Civic Disposition

Civic disposition memiliki beberapa ciri-ciri sebagaimana dijabarkan oleh Branson (1999 : 23-25) sebagai berikut.

- 1) Menjadi masyarakat independen.
- 2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
- 3) Menghormati harkat dan martabat setiap individu.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

- 5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

3. Analisis Civic Responsibility

Civic Responsibility menurut Rusnaini (2018, hlm.5) merupakan pemahaman dalam hal hak dan tugas yang dimiliki oleh warga negara yang memiliki tanggung jawab, dimana tanggung jawab sipil itu sendiri merupakan ciri kepribadian positif yang menjadi landasan pemikiran masyarakat, pengorganisasian sistem nilai, perilaku dan fungsi sebagai suatu kesatuan lingkungannya, serta dalam hal-hal yang bersifat wajib sebagai warga negara. dalam hal ini penanaman karakter merupakan puncak daripada pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini ciri-ciri dari tanggung jawab meliputi : (a) Tanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa, (b) Tanggung jawab terhadap diri sendiri, (c) Tanggung jawab terhadap tugas atau mandat yang diberikan, (d) Tanggung jawab terhadap keluarga, (e) Tanggung jawab terhadap masyarakat, (f) Tanggung jawab terhadap peraturan yang ada.

Pendidikan karakter menurut Mona Adha (2020, hlm. 97) dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan menggunakan keterampilannya, menggali dan memtovisi serta mepersonalisasikan nilai-nilai karakter peserta didik agar tewujud dalam perilaku sehari-sehari. Tujuan pendidikan karakter dalam Nurfitri (2021), diantaranya :

1. Mampu mengembangkan hati dan nurani pada siswa agar menjadi warga negara dengan ciri khas pada budaya yang berkualitas dan sesuai profil pelajar pancasila.
2. Membangun kebiasaan dan sifat pada peserta didik yang benar secara sesama sesuai tradisi pada budaya bangsa yang bersifat religius.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab serta rasa jiwa kepemimpinan bagi seorang generasi penerus bangsa.
4. Meningkatkan kemampuan pada siswa agar menjadi seseorang yang berguna dan bertanggung jawab.
5. Menciptakan lingkungan yang ideal dalam mendidik karakter peserta didik khusus nya lingkungan pendidikan.

Dari uraian penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengenalan tanggung jawab kewarganegaraan sebagai warga negara dapat dilakukan secara optimal di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter melalui program-program pembiasaan yang dapat meningkatkan karakter peserta didik

Menurut Gottlieb & Robinson (2020, hlm. 144) *Civic Responsibility* merupakan kegiatan dan sikap yang berkaitan dengan tanggung jawab sipil sebagai bentuk partisipasi secara sukarela. Tanggung jawab sipil meliputi partisipasi aktif, terinformasi, terlibat, dan konstruktif dalam kehidupan publik masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan umum. Menurut Wilcox (2020, hlm. 144) bahwa dalam mengembangkan tanggung jawab sipil dipandang sebagai bagian penting dari keberhasilan, yang mengarah pada hasil yang lebih baik.

Pam Schiller & Tamera Bryant dalam Azhami Johani dan Heldalia (2019) tanggung jawab di definisikan sebagai “perilaku yang membentuk respons kita dalam situasi sehari-hari, membimbing penilaian moral tertentu”. dari sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan respons yang dapat mempengaruhi disposisi moral seseorang. Pada pemeriksaan lebih lanjut, moralitas yang disebutkan disini berkaitan dengan pengakuan sadar dalam melaksanakan tugas dan hak-hak tanpa pengaruh eksternal.

Nurmalina dan Syaifullah dalam Damar Bagaswara (2020) warga negara yang bertanggung jawab akan berusaha semaksimal mungkin guna menjalankan dan memanfaatkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tanggung jawab warga negara, mengetahui batasan-batasan dalam melaksanakan tanggung jawab menjadi urgensi tersendiri, meliputi : (a) tanggung jawab pribadi seperti hubungan manusia dengan sang pencipta, dan (b) tanggung jawab sosial, seperti tanggung jawab kepada sesama manusia, terhadap lingkungan dan terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan pendapat diatas, tanggung jawab manusia sudah ada meliputi hal terkecil dari dalam dirinya, dari halnya tanggung jawab kepada tuhan, diri sendiri, sampai masyarakat di lingkungan nya tinggal. Menciptakan tatanan

yang baik melalui tanggung jawab inilah perlunya pengoptimalan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dilaksanakan pribadi maupun yang berkaitan dengan orang lain disekitar.

Kualitas suatu negara tercermin dari sejauh mana penduduknya dapat berpartisipasi dalam mengatasi tantangan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan sehingga diperlukan diperlukan prinsip dan standar dalam proses berpikir dan tindakan warga negara yang teladan. Nurmalina dan Syaifullah dalam Naufal Adli (2019) berpendapat bahwa “warga negara yang menunjukkan akuntabilitas (tanggung jawab kewarganegaraan) berusaha memenuhi kewajibannya secara maksimal dan memanfaatkannya sesuai aturan yang berlaku”. Dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan sikap bertanggung jawab memerlukan kecerdasan sipil, karena warga negara yang baik mengikuti aturan yang ada serta menghindari tindakan yang tidak diinginkan.

Menurut *Center for Civic Education (CCE)* (1994, hlm. 37) Karakter warga negara berupa tanggung jawab warga negara (*Citizen responsibility*) antara lain:

1. Mematuhi peraturan hukum.
2. Mengakui dan menghormati hak-hak individu lain.
3. Memiliki kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Berperan dalam mengawasi pejabat terpilih dalam menjalankan tanggung jawab mereka.
5. Terlibat dalam dialog dengan wakil di lembaga pendidikan, pemerintahan lokal, dan pemerintahan nasional.
6. Memberikan suara dalam pemilihan umum.
7. Memenuhi kewajiban membayar pajak.
8. Bertindak sebagai saksi di pengadilan.
9. Menunjukkan kesiapan untuk ikut dalam wajib militer.

Dari hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Civic responsibility* merupakan kegiatan dan sikap yang berkaitan dengan tanggung jawab sipil sebagai bentuk partisipasi aktif secara sukarela yang dibarengi dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang

bertanggung jawab. Tanggung jawab sipil dapat diartikan sebagai partisipasi aktif, informatif, terlibat serta konstruktif dalam kehidupan publik dengan fokus untuk mencapai kebaikan bersama.

4. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi secara etimologis, menurut kamus webster yang dikutip oleh Abdul Wahab dalam Kania (2019 hlm 47) konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Menurut Usman (2002) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh berikutnya.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif, Setiawan (2004). Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

b. Tujuan Implementasi

Menurut Badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik Indonesia (2022), ada beberapa tujuan implementasi, yaitu :

- 1) Terdapat tujuan yang paling utama ialah untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disiapkan secara matang, baik yang dibuat oleh individu atau kolektif.
- 2) Tujuan kegiatan ini ialah untuk mengevaluasi dan mencatat proses pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk memperoleh tujuan dalam rancangan atau kebijakan yang ditentukan.
- 4) Bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat untuk secara efektif mengimplementasikan suatu rancangan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- 5) Pengukuran keberhasilan pada suatu kebijakan yang telah dirumuskan untuk tujuan meningkatkan atau memajukan peningkatan kualitas.

c. Tahapan Implementasi Pendidikan

Afiful Ikhwan (2016 hlm 130) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur yang hendaknya di pertimbangkan untuk diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kegiatan yang mengandung unsur antara lain :

- 1) Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya
- 2) Adanya proses
- 3) Hasil yang ingin dicapai
- 4) Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu

Dari penjelasan Afiful Ikhwan diatas, sekiranya perlu adanya penjelasan secara rinci mengenai urgensi dari setiap poin dalam teknik pelaksanaan implementasi. Pada poin pertama yang harus di perhatikan adalah kegiatan yang telah ditetapkan sebelum nya, dimana kegiatan-kegiatan sebelum nya dijadikan sebagai bahan acuan dan koreksi dalam meng-implementasikan suatu kegiatan terbaru. Hal ini dilakukan agar

dalam pelaksanaan kegiatan terbaru dapat lebih dijalankan secara optimal berdasarkan analisis dari faktor pendukung dan penghambat pada kegiatan sebelumnya.

Pada poin kedua mengenai adanya proses adalah pada sebelum suatu kegiatan dilaksanakan atau diimplementasikan, harus ada proses perencanaan yang matang dan penetapan target capaian yang jelas agar dalam mengimplementasikan suatu kegiatan khususnya kegiatan pendidikan dapat berjalan secara optimal dan memiliki sistem asesmen yang jelas.

Unsur yang ketiga dalam pelaksanaan yang harus dipertimbangkan adalah hasil yang ingin dicapai, dimana pada poin ini sebuah kegiatan perlu untuk ditentukan mengenai indikator keberhasilan dari kegiatan yang diimplementasikan. Hal ini penting dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau perlu adanya perbaikan-perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada unsur terakhir dalam teori implementasi suatu kegiatan, khususnya kegiatan pendidikan adalah urgensi dari adanya kegiatan tersebut dan dampak implementasi yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini tentu saja urgensi dari kegiatan pendidikan khususnya kegiatan pendidikan karakter dalam program P5 adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga memiliki daya saing secara global.

d. Implementasi Program P5

Proses implementasi melibatkan perencanaan yang cermat, dimana implementasi dimulai hanya ketika fase perencanaan dianggap tidak sempurna. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila difokuskan pada peserta didik yang secara konsisten mendemonstrasikan pengamalan nilai Pancasila, khususnya pada aspek-aspek berikut: beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Salah satu cara

penanaman karakter-karakter tersebut ialah melalui pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5.

P5 ialah salah satu produk kurikulum merdeka yang implementasinya dilakukan di luar mata pelajaran dengan tujuan membangun kemampuan peserta didik yang ada pada setiap individu peserta didik. P5 telah direncanakan dengan hati-hati dan optimal melalui beberapa tahap, dan ini mencakup sejumlah topik yang dapat dipilih oleh sekolah. Prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) :

- a) Holistik : Holistik disini memaknai ketika melihat segala hal dengan utuh dan menyeluruh pada semua aspek, Dalam konteks pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kerangka pemikiran holistik dapat mendorong untuk menyelidiki suatu tema secara keseluruhan dan mengidentifikasi keterkaitan berbagai unsur untuk memahami suatu persoalan secara mendalam.
- b) Kontekstual : Prinsip kontekstual ialah upaya dalam membangun kegiatan pendidikan berdasarkan pengalaman sehari-hari yang autentik. Pendekatan ini mendorong guru dan peserta didik untuk menggunakan lingkungan dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai sumber utama materi pembelajaran.
- c) Berpusat Pada Peserta Didik : Prinsip berpusat pada peserta didik berlaku untuk strategi instruksional sehingga memotivasi pelajar untuk mengambil peran pembelajaran secara aktif mengontrol pembelajaran itu sendiri, termasuk memberikan pilihan untuk memilih dan menyarankan tema proyek untuk proyek profil berdasarkan minat peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan, peran guru ialah sebagai fasilitator pembelajaran, menawarkan pelajar kesempatan untuk memilih topik berdasarkan kemampuan masing-masing.
- d) Eksploratif : Pada hal ini diharapkan perencanaan dan pengimplementasiannya, seorang guru memiliki ketetapan untuk dapat

merencanakan dan menyusun kegiatan proyek profil secara terukur sesuai langkah-langkah agar dapat memudahkan pelaksanaan P5. Prinsip eksplorasi mengacu pada gagasan menciptakan area yang luas untuk proses penyelidikan dan pengembangan diri. Pembelajaran ko-kurikuler menjadi fokus proyek untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila, oleh karena itu ada berbagai kemungkinan untuk mengeksplorasi dalam hal materi siswa, alokasi waktu, dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran

5. Karakter

Dikutip dari Effendi (2020, hlm 5) karakter secara terminologi mengacu pada pendekatan idealis spiritualis yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif, dimana yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motivator dan dominisator sejarah baik bagi individu maupun bagi perubahan nasional. Istilah karakter berasal dari bahasa latin "*Character*", yang antara lain berarti : watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak.

Dalam KBBI sendiri kata karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ki Hadjar Dewantara memandang karakter sebagai watak atau budi pekerti. Menurut nya budi pekerti adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga.

Dikutip dari Hendayani (2019) nilai-nilai karakter (*character building*) peserta didik menjadi poin yang sangat penting dari tugas pendidikan. Istilah karakter (*character*) berasal dari bahasa Yunani "*charassian*" yang berarti "*to mark*" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga jika orang itu rakus, tukang bohong, korupsi, pemarah, semena-mena dan berperilaku jelek lainnya, maka dikatakan orang tersebut memiliki karakter yang buruk. Begitupun sebaliknya, jika orang tersebut berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah moral maka disebut dengan orang yang berkarakter mulia.

Dikutip dari Hendayani (2019) sementara itu Imam al-Ghazali mendefinisikan karakter sebagai akhlak, yakni spontanitas seorang manusia dalam bertutur kata dan bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam dirinya sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Oleh karenanya, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan yang paling penting dari pendidikan itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam Effendi (2020) ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu : 1. Karakter cinta tuhan dan segenap ciptaan nya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran dan diplomatis, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan dan suka menolong, 6. Percaya diri dan pekerja keras, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, 9. Karakter toleransi dan cinta damai. Kesembilan karakter itu, perlu ditanamkan dalam pendidikan holistik dengan menggunakan metode *knowing the good, feeling the good, dan acting the good*.

Menurut Dyah Sriwilujeng (2017) karakter adalah unsur kepribadian yang ditinjau dari etis atau moral. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan sebagai manifestasi nilai dan kapasitas moral manusia dalam menghadapi kesulitan. Howard dalam Marleny Leasa dan John Rafafy Batlolona (2017) menyebutkan pendidikan karakter merupakan upaya mempersiapkan individu untuk beretiket, menilai diri sendiri, dan bertindak untuk melakukan apa yang harus dilakukan kepada orang lain.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87, tahun 2017 menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Menurut Amri di kutip dari Sulandari Ningsih (2016) mengatakan bahwa pembentukan karakter dapat dimulai sejak anak usia dini sehingga karakter anak mudah untuk terbentuk. Artinya sejak usia dini anak mulai dibiasakan mengenal mana perilaku atau tindakan yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dan tidak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter adalah kepribadian mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik yang akan menjadi kebiasaan.

6. Kurikulum Merdeka

a. Penjelasan Mengenai Kurikulum Merdeka

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia merancang kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum merdeka, dimana perancangan kurikulum tersebut bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat dan mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan berfikir kritis. Hal tersebut dilakukan sambil mempromosikan nilai-nilai seperti tanggung jawab pribadi dan rasa hormat terhadap keragaman melalui program P5. Pada awal pengembangan kurikulum merdeka ditujukan untuk menangani beberapa permasalahan pendidikan yang ditimbulkan dari adanya pandemi *covid-19* dimana diantaranya adalah timbulnya learning loss yang terjadi pada peserta didik.

Kemajuan sebuah bangsa khususnya dalam bidang pendidikan ditentukan oleh salah satu faktor yang paling penting yaitu pengembangan kurikulum. Kebijakan pendidikan yang baik dapat dilihat dari implementasi kurikulum yang diterapkan karna kurikulum merupakan jantungnya pendidikan yang menentukan berlangsung atau tidaknya pendidikan (Munandar A, 2017). Berdasarkan peraturan perundang-undangan “(Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional), kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum Merdeka Belajar baru-baru ini diperkenalkan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemendikbudristek, di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum merdeka belajar ialah kurikulum yang memadukan rangkaian kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Pendekatan ini diyakini lebih efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan kompetensi pada peserta didik, karena memberikan mereka cukup waktu untuk pemahaman dan penguatan keterampilan. Kurikulum belajar mandiri ialah kerangka kerja pendidikan yang mencakup pendekatan pembelajaran berbasis bakat dan minat.

Istilah merdeka belajar telah disampaikan dan didefinisikan oleh para ahli dimana salah satunya oleh Carl Rogers dikutip dari buku pengembangan dan implementasi kurikulum merdeka (2023, hlm 13) bahwa proses belajar berpusat pada inisiatif siswa untuk belajar, kemudian dikenal dengan istilah pembelajaran berpusat pada siswa.

Inisiatif kurikulum merdeka disusun untuk menghargai setiap individu yang unik dari proses pembelajaran masing-masing siswa dimana kurikulum ini mendorong peserta didik untuk mengambil bagian atas pembelajaran mereka sendiri. Model ini kontras dengan pendekatan pendidikan tradisional yang berpusat pada guru dan sedikit menekankan pada otonomi pelajar. Dibawah konsep pendidikan kurikulum merdeka peserta didik didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan terlibat dalam kegiatan kolaboratif dan mandiri.

Menurut Kementerian Pendidikan Budaya Teknologi dan Riset, kurikulum merdeka harus dipelajari dahulu oleh guru sebelum mengajarkannya kepada peserta didik. Maka dari itu implementasi kurikulum merdeka tidak terlepas dari bimbingan seorang guru, maka dari itu, guru memerlukan sebuah strategi dalam penerapannya yaitu

menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Proyek tersebut disebut dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang diharapkan dapat memberikan lulusan yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Berbagai kajian nasional dan internasional secara konsisten menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergulat dengan krisis belajar yang berkepanjangan. Parahnya pandemi Covid-19 semakin diintensifkan oleh keadaan yang ada. Untuk mengatasi krisis pendidikan yang ada, sangat penting untuk menerapkan modifikasi sistematis, terutama melalui pembentukan kurikulum yang disempurnakan. Oleh karena itu, dalam menanggapi krisis pendidikan yang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan kurikulum baru yang dikenal sebagai Kurikulum Mandiri (Kemdikbud, 2022). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar ini dilaksanakan dalam bentuk upaya mencapai tujuan nasional Pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki keunggulan dan dapat berdaya saing dengan rekan-rekan mereka di negara lain. Wujud kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing terlihat pada peserta didik yang berakhlak mulia dan menunjukkan kemampuan kognitif tingkat lanjut, khususnya pada ranah literasi dan numerasi.

b. Kelebihan Kurikulum Merdeka

Adapun kelebihan dari Kurikulum Merdeka ialah sebagai berikut:

- a) Lebih sederhana dan mendalam Penekanan inti dari Kurikulum Merdeka terletak pada materi esensial. Peserta didik lebih mungkin untuk menyerap pengetahuan secara efektif ketika mereka terlibat dalam proses pembelajaran yang langsung dan komprehensif, tanpa rasa urgensi atau tergesa-gesa. Integrasi desain yang menarik secara visual dalam metodologi pembelajaran mendalam memiliki potensi untuk meningkatkan konsentrasi pelajar dan meningkatkan minat dalam proses pembelajaran.

- b) Lebih merdeka Kurikulum Mandiri Mendikbud RI merupakan standar pembelajaran. Instruktur dapat mengkonstruksi proses pembelajaran untuk memenuhi tuntutan dan tujuan pembelajaran dengan kebebasan. Jika dilaksanakan, proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar akan lebih baik daripada yang tidak.
- c) Lebih relevan dan interaktif Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang relevan dan interaktif dapat menghasilkan hasil yang positif dalam proses pembelajaran. Implementasi metodologi pembelajaran interaktif memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dan mendorong pengembangan kompetensi mereka. Melibatkan pelajar dalam pembelajaran interaktif melalui kegiatan berbasis proyek mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mengatasi masalah lingkungan.

6. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

a. Definisi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Berikut merupakan profil pelajar pancasila yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Gambar 2.2 Enam Indikator Profil Pelajar Pancasila



Sumber : Kemendikbud 2020

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberikan kesempatan kepada siswa dalam mendalami pengetahuan serta memberikan keleluasaan kepada siswa dalam belajar lingkungan di sekitarnya sebagai bentuk penguatan karakter siswa. Siswa memiliki keleluasaan untuk mempelajari tema dan isu-isu penting seperti kebudayaan, wirausaha, dan teknologi sehingga siswa dapat melakukan hal yang nyata dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat memberikan motivasi serta inspirasi siswa dalam memberikan kontribusinya serta dampak bagi lingkungan sekitarnya.

b. Konsep dan Tema Program P5

Pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau sederajat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari total jam pelajaran selama 1 (satu) tahun. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama.

1. Pemerintah menetapkan tema-tema utama untuk dirumuskan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sebagai berikut. Gaya Hidup Berkelanjutan. Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.
2. Kearifan Lokal. Peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, konsep dan nilai-nilai dibalik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.
3. Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan, secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Tema ini ditujukan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.
4. Bangunlah Jiwa dan Raganya. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (*wellbeing*),

perundungan (*bullying*), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.

5. Suara Demokrasi. Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan/atau dalam dunia kerja. Tema ini ditujukan untuk jenjang SMP, SMA, SMK dan sederajat.
6. Rekayasa dan Teknologi. Peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya *smart society* dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat.
7. Kewirausahaan. Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuhkembangkan. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas.

Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan sederajat. Karena jenjang SMK/MAK sudah memiliki mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang SMK.

8. Kebekerjaan. Peserta didik menghubungkan

berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang SMK/MAK.

c. Manfaat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

- a) Memberikan penguatan karakter dalam mengembangkan kompetensi sebagai generasi bangsa.
- b) Partisipasi dalam merencanakan pembelajaran yang aktif serta berkelanjutan.
- c) Mengembangkan keterampilan, sikap, serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan kegiatan proyek pada waktu tertentu.
- d) Melatih kemampuan dalam memecahkan masalah dalam beragam situasi belajar.
- e) Menunjukkan tanggung jawab serta kepedulian terhadap suatu permasalahan di sekitar siswa sebagai salah satu bentuk hasil belajar.
- f) Menghargai proses pembelajaran dan bangga terhadap hasil pencapaian yang di usahakan secara optimal (Direktorat Sekolah Dasar, 2022:18).

d. Tahapan Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

1. 2 (dua) proyek dengan 2 (dua) tema berbeda di SD/MI,
2. 3 (tiga) proyek dengan 3 (tiga) tema berbeda di SMP/MTs dan SMA/MA kelas X,
3. 2 (dua) proyek dengan 2 (dua) tema berbeda di kelas XI dan XII SMA/MA,
4. 3 (tiga) proyek dengan 2 (dua) tema pilihan dan 1 (satu) tema Kebekerjaan di kelas X, 2 (dua) proyek dengan 1 (satu) tema pilihan dan 1 (satu) tema Kebekerjaan di kelas XI, dan 1 (satu) proyek dengan tema Kebekerjaan di kelas XII SMK/MAK. Kelas XIII pada SMK program 4 (empat) tahun tidak

mengambil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk SMK/MAK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilaksanakan secara terpadu berkolaborasi dengan mitra dunia kerja, atau dengan komunitas/organisasi serta masyarakat.

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) terdapat tahapan perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, diantaranya:

- a) Dibentuknya kelompok tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila
- b) Menentukan tingkat kesiapan sekolah;
- c) Mengembangkan parameter, kerangka konseptual, dan distribusi waktu untuk prakarsa yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara keseluruhan;
- d) Membangun modul proyek;
- e) Merencanakan teknis pelaporan hasil proyek;

Merujuk pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) terdapat tujuh tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah ditentukan oleh kemendikbudristek yakni ada tema, diantaranya:

- a) Gaya Hidup Berkelanjutan;
- b) Kearifan Lokal;
- c) Bhineka Tunggal Ika;
- d) Bangunlah Jiwa dan Raganya;
- e) Suara Demokrasi;
- f) Rekayasa dan Teknologi;
- g) Kewirausahaan”;

7. Bangunlah Jiwa dan Raganya

Berdasarkan buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diterbitkan Kemendikbudristek (2021) tema bangunlah jiwa dan raganya dimana peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (*wellbeing*), perundungan (*bullying*), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.

Contoh dari pengembangan tema dan topik bangunlah jiwa dan raganya fase E adalah koordinasi kegaitas OSIS antarsatuan pendidikan dalam bentuk kepanitiaan untuk kampanye dan aksi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Relevansi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah untuk mendapatkan data kasus perundungan di lingkungan sekolah, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk mengambil kebijakan dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah agar tercipta sekolah yang nyaman dan aman untuk belajar.

B. Penelitian Terdahulu

1. Mirazein Gautami (2022) dengan judul penelitian “*Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Merdeka sebagai Wujud Pembentukan Warga Negara yang Baik*”. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru atau tim fasilitator proyek dan peserta didik kelas X. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka di SMA Negeri 25 Bandung telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, melalui kegiatan proyek peserta didik kelas telah menunjukkan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila khususnya pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan

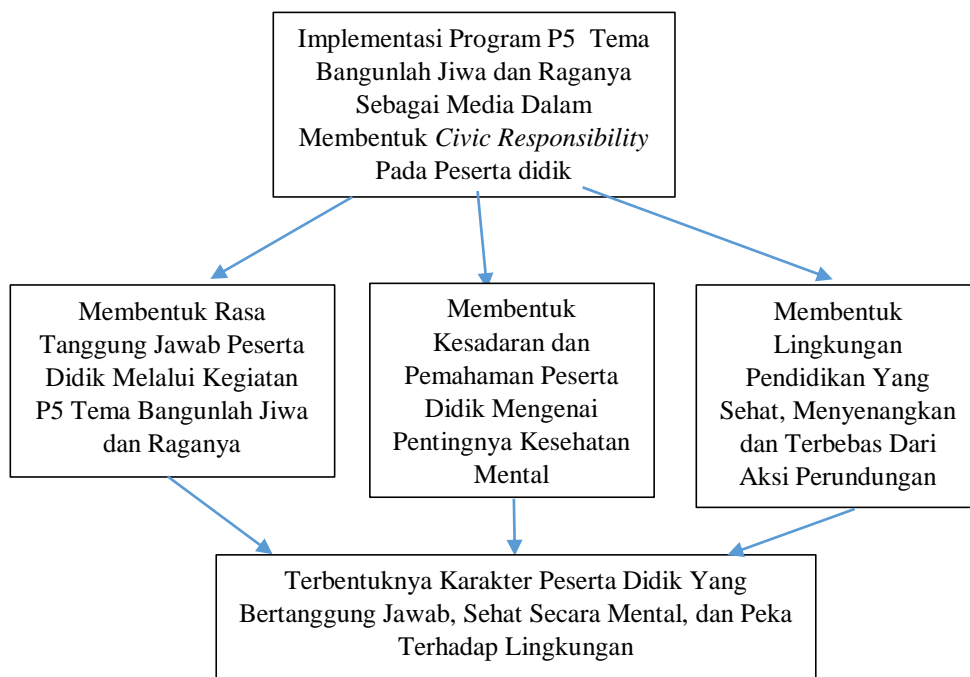
Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. (2) Kendala yang dihadapi saat kegiatan proyek berlangsung diantaranya anggota kelompok yang susah diatur untuk diajak berdo'a bersama, tingginya sikap egosentrisme pada peserta didik, dan sulitnya anggota kelompok untuk diajak musyawarah (3) Dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu melalui cara mengingatkan dan mengajak anggota kelompok untuk melaksanakan ibadah, berdiskusi melakukan evaluasi saling mengingatkan dan saling memaafkan terhadap anggota kelompok yang bersikap egois, dan terus mengajak anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan diskusi atau musyawarah.

2. Zakiyatul Nisa (2022) dengan judul penelitian "***Implementasi Keterampilan Pembelajaran Abad 21 Berorientasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo***". Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Perencanaan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam menerapkan pembelajaran abad 21 berorientasi kurikulum merdeka ada beberapa tahap yaitu a.) tahap kesiapan sekolah, b.) mengidentifikasi tema yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud, c.) menentukan tema yang lebih spesifik sesuai keadaan dilingkungan sekolah, d.) menentukan alokasi waktu, e.) pembuatan modul proyek, f.) membuat sub elemen dan Asessen (Sumatif dan Formatif). 2.) Proses pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam menerapkan pembelajaran abad 21 berorientasi kurikulum merdeka ada beberapa tahap yaitu, a.) tahap Fell (pengenalan) dengan mendatangkan narasumber, c.) kontekstual, d.) *Do*(Aksi) e.) *Share*, 3.) Evaluasi pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam menerapkan pembelajaran abad 21 berorientasi kurikulum merdeka evaluasi pembelajaran proyek pada saat setelah dilakukan pameran hasil proyek craft preneur. Berdiskusi bersam fasilitator untuk mengevaluasi diseluruh rangkaian dengan membagikan angket. Selain itu juga dilakukan pada saat pembelajaran proyek dengan asesmen sumatif dan nanti nilai akan dilampirkan di rapot pembelajaran proyek.

3. Andriani Safitri, Dwi Wulandari, dan Yusuf Tri Herlambang (2022) dengan judul penelitian “***Proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan dalam Meningkatkan Karakter Peserta didik Indonesia***”. Subjek dari penulisan penelitian ini adalah karakter yang dimiliki siswa Indonesia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang paling optimal dalam mengembangkan karakter peserta didiknya melalui pengembangan profil pelajar pancasila. Dimana pada pengembangan profil pelajar pancasila ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan berbasis proyek. Sehingga, diharapkan kedepannya peserta didik menjadi masyarakat yang mempunyai nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang tertanam di tiap butir sila-sila pada pancasila.

C. Kerangka Berfikir

Menurut Arif (2017, hlm. 4) Suatu kerangka pemikiran mengacu pada gambaran (narasi) atau pernyataan (proposisi) mengenai struktur kognitif yang memandu pendekatan dalam pemecahan masalah yang telah diakui atau dirumuskan. Dalam penelitian kualitatif, kerangka kognitif ini, atau kerangka berpikir, memainkan peran penting dalam menentukan keseluruhan ketepatan proses penelitian. Selain itu, paparan dalam penelitian harus mampu menjelaskan dengan cermat dan mengesahkan dengan tegas asal-usul permasalahan yang sedang dibahas.



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024)